



**PERANAN K.H. NURHASAN AL-UBAIDAH DALAM PENGEMBANGAN
PONDOK PESANTREN LDII BURENGAN KEDIRI TAHUN 1990-2010**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Oleh:

Galuh Prakosa Tricahyo

NIM 13030110130025

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Galuh Prakosa Tricahyo, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 23 Mei 2018



Galuh Prakosa Tricahyo

NIM 13030110130025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah ketika aku menginginkannya”.

(Annie Gottlier)

“Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah. Jika tak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya”.

(Maya Angelou)

Dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta,
Saudaraku, dan segenap Civitas
Akademika Universitas Diponegoro

HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui,
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Singgih Tri S., M. Hum.
NIP 19640626 198903 1 003

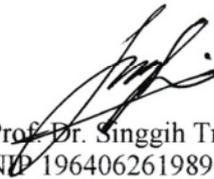
Skripsi dengan Judul “Peranan K.H. Nurhasan Al-Ubaidah Dalam Pengembangan Pondok Pesantren LDII Burengan Kediri Tahun 1990-2010” yang disusun oleh Galuh Prakosa Tricahyo (13030110130025) telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Senin, 31 Mei 2018.

Ketua,



Dr. Haryono Rinardi, M. Hum.
NIP 196703111993031004

Anggota I,



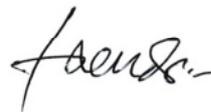
Prof. Dr. Singgih Tri S., M.Hum.
NIP 196406261989031003

Anggota II,



Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum.
NIP 196808291994031 001

Anggota III,



Mahendra Puji Utama, S.S., M.Hum
NIP 197124021999031001

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Redyanto Noor, M. Hum
NIP. 195903071986031002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta telah senantiasa melimpahkan rezeki dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan K.H. Nurhasan Al-Ubaidah Dalam Pengembangan Pondok Pesantren LDII Burengan Kediri tahun 1990-2010”. Skripsi ini disusun untuk menempuh ujian strata 1 pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil studi dan penelitian dalam bidang ilmu sejarah. Selama proses penulisan skripsi ini terdapat berbagai hambatan, tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, bantuan materi maupun spiritual kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mujiri Wahono (alm) dan ibu Sunarsih, yang selalu mencurahkan segala doa dan kasih sayangnya kepada penulis, dan kakakku Ika Yunira Arahmawati, Devi Ismayawati Wahono, serta adikku Nanda Yuli Akhirdianto yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa bersalah dan permohonan maaf penulis ucapkan sedalam-dalamnya pada keluarga, karena keterlambatan penyelesaian studi yang dialami penulis sehingga keluarga selalu bertanya-tanya kapan lulus.
2. Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam memberikan arahan selama proses penulisan skripsi.
3. Dr. Haryono Rinardi, M. Hum., Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., Mahendra Puji Utama, S.S. M. Hum., dan selaku dosen penguji yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya, saat komprehensif dan juga sidang skripsi.

4. Seluruh staf pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya yang telah sudi berbagi ilmu selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staf administrasi akademik, Perpustakaan Departemen Sejarah, dan perpustakaan UNDIP yang telah membantu kelancaran akademik serta kelancaran studi pustaka.
6. Kepada Pimpinan pondok pesantren Wali Barokah, bapak Drs. H. Sunarto, M. Si. dan sekretaris pondok pesantren bapak Daud Sholeh, yang telah memfasilitasi dan membantu penelitian tentang pondok pesantren Wali Barokah.
7. Teman-teman jurusan sejarah, dari kakak angkatan sampai adik angkatan, terutama teman-teman Pagupon dari Azhari Gita Kurniawan, Arif Ashadi, Andi Cahyono Putro, Aska Rizki Kurniawan, Abdullah Muiz, Johar Ishaq, Muhammad Syaiful Bahtiar, Mela Royastika, Nonik Noer, Risda Guntari, Debora P. Ginting, Dias Danu Wiharja, Agit, Roni Fauzan, Wahyu Tri Sutrisno, Supriyono Hidayat, Muhammad Saifudin, dan Ahmad Suntoro alm. yang selalu setia menyemangati dan membantu dalam pengerjaan skripsi saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Tidak ada hal lain yang penulis harapkan selain kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan penulisan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan.

Semarang, 23 Mei 2018



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN	xvi
<i>SUMMARY</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II BERDIRINYA PONDOK PESANTREN LDII	20
A. Peranan K.H. Nurhasan Al-Ubaidah Sebagai Pendiri Pondok	20
1. Kelahiran LEMKARI	28
B. Pondok Pesantren LEMKARI Sampai Pondok LDII Wali Barokah	29
1. Peralihan Pondok Burengan Dari K.H. Nurhasan Kepada Drs. Bachroni Menjadi Pondok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	29
2. Pondok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	34
3. Pondok Wali Barokah	40
BAB III PONDOK PESANTREAN LDII BURENGAN KEDIRI SETELAH BERNAUNG DIBAWAH YAYASAN WALI BAROKAH	46
A. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren LDII Burengan Kediri Tahun 1990-2010	46
1. Kurikulum Ponpes LDII Burengan Kediri	52
2. Metode Pembelajaran	54
3. Jaringan Pembelajaran	58

4.	Tingkatan Kelas	59
B.	Kegiatan Santri Pondok Pesantren Wali Barokah	63
BAB IV	HUBUNGAN SOSIAL PONPES WALI BAROKAH BURENGAN KEDIRI DENGAN MASYARAKAT	64
A.	Rekrutmen Santri	67
B.	Penugasan	70
C.	Praktik Budi Luhur	73
D.	Kerja Sama Pondok Pesantren LDII Burengan Kediri Dengan Masyarakat Sekitarnya	72
E.	Hubungan Pondok Pesantren LDII Dengan Ormas LDII	75
1.	Peranan LDII di Bidang Pendidikan	77
2.	Reaktualisasi Pancasila di Setiap Lapisan Masyarakat	81
BAB V	SIMPULAN	81
	DAFTAR PUSTAKA	83
	DAFTAR INFORMAN	88
	DAFTAR LAMPIRAN	90

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ASPI	: Aspirasi Pemuda Islam
BSM	: Bank Syariah Mandiri
Depag	: Departemen Agama
Dirjen	: Direktorat Jenderal
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
Golkar	: Golongan Karya
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
ID	: Islam Djamaah
KADIM	: Karyawan Dakwah Islam
KAMTIBMAS	: Keamanan dan Ketertiban
K.H.	: Kyai Haji
KJS	: Kartu Jakarta Sehat
KSPI	: Keluarga Studi Pemuda Islam
LDII	: Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Lemkari	: Lembaga Karyawan Islam
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MOU	: Memorandum of Understanding
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ormas	: Organisasi Masyarakat
PBNU	: Pengurus Besar Nahdatul Ulama
PC	: Pimpinan Cabang
PKI	: Partai Komunis Indonesia
Ponpes	: Pondok Pesantren
Posketren	: Pos Kesehatan Pesantren

PPB	:	Pondok Pesantren Burengan
PSII	:	Partai Serikat Islam Indonesia
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SHU	:	Sisa Hasil Usaha
SPN	:	Sekawan Persada Nusantara
TBP	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UB	:	Usaha Bersama
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
UUD	:	Undang-Undang Dasar
YCI	:	Yayasan Citra Islam

DAFTAR ISTILAH

Agamis	:	Orang yang taat menjalankan agama.
Al-Hafiz	:	Yang maha memelihara.
Amir	:	Sebuah gelar pemimpin.
Amirul Mukminin	:	Pemimpin bagi orang-orang yang beriman.
Babad Alas	:	Menebang hutan untuk membuka lahan baru.
Baiat	:	Upacara pelantikan seorang pemimpin.
Khlakul karimah	:	Akhlak yang baik atau terpuji
Mar ma'ruf nahi munkar	:	Sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik, dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat.
Bid'ah	:	Perbuatan yang dikerjakan, tidak menurut contoh yang sudah di tetapkan, termasuk menambah atau mengirangi ketetapan.
Da'i	:	Pendakwah.
Dalil	:	Hal yang menunjuk pada apa yang dicari, berupa alasan, keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang di cari.
Friksi	:	Pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat.
Harokah islamiah	:	Suatu gerakan menyeru manusia kepada Allah SWT, bukanya kepada kepentingan para petugas di dalamnya atau orang-orang yang memikul tanggung jawab.
Ijma'	:	Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama, berdasarkan alquran dan hadis, dalam suatu perkara yang terjadi.
Imarah	:	Pembangunan, kemakmuran yang diberikan untuk seorang anak perempuan.

Institusionalisasi	: Proses yang dilewati suatu norma masyarakat yang baru, untuk menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan, sehingga dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari.
Jeding	: Kamar mandi.
Jummud	: Pikiran dimana tidak bisa melihat sesuatu yang lebih luas lagi.
Kelompok warman	: Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia (NII) yang dikenal sebagai teror warman.
Khurofat	: Suatu kepercayaan dan keyakinan pada segala sesuatu yang menyalahi aturan agama islam.
Komunisme	: Ideologi yang brekenaan dengan filosofi politik, sosial dan ekonomi, dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, dan tidak adanya kelas sosial.
Kultural	: Berhubungan dengan Kebudayaan.
Manhaj	: Kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran-pelajaran ilmiah
Mubaligh	: Pembawa ilmu yang berkewajiban menyampaikan semua ilmu yang dimiliki.
<i>Ndeprog</i>	: Duduk di lantai.
Pancasilais	: Penganut ideologi pancasila yang baik dan setia.
Pegon	: Huruf arab yang di modifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
Perawi hadist	: Para imam yang tidak tercela hafalan hadisnya dan cermatnya.
Qiyas	: Menggabungkan atau menyamakan artinya, menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru, yang belum ada pada masa sebelumnya.
Ru'yat	: Melihat hilal (bulan sabit) pada saat/ beberapa saat terbenam matahari pada akhir bulan sya'ban.

- Salafiyyah : Salah satu metode dalam agama islam yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan, berdasarkan syariat yang ada pada generasi Muhammad dan para sahabat, kemudian setelah mereka (murid para sahabat) dan setelahnya (murid para murid sahabat).
- Sufisme : Ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dhahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi.
- Tanjim : Pengaturan panitia.
- Tauhid : Konsep dalam akidah islam yang menyatakan keesaan Allah.
- Wahhabiyah : Sebutan bagi orang yang mengikuti paham yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	
A. Surat Pernyataan No. 165/A-VI/1979	90
B. Pernyataan Penjelasan Masalah LEMKARI No. 199/F-1/IX/1979	93
C. Prasasti Peresmian Gedung Wali Barokah Pondok LDII	95
D. Prasasti Renovasi Masjid Baitul A'la Pondok LDII	95
E. Prasasti Kantor LEMKARI	96
F. Prasasti Menara Pondok Agung Asm'ul Husna	96

RINGKASAN

Skripsi ini berjudul “Peranan K.H. Nurhasan Al-Ubaidah dalam Pengembangan Pondok Pesantren LDII Burengan Kediri tahun 1990-2010”. Beberapa permasalahan yang dikaji adalah; Pertama, bagaimana latar belakang berdirinya pondok pesantren LDII Burengan Kediri dan peranan K.H. Nurhasan dalam mengembangkan ajarannya, dan bagaimana pula awal perkembangan sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren LDII Burengan Kediri, bagaimana hubungan Pondok pesantren LDII Burengan Kediri dengan masyarakat sekitarnya?. Dalam mengkaji permasalahan tersebut digunakan metode sejarah dengan pendekatan sosial budaya.

K.H. Nurhasan dan H. Ahmad Ibroham yang memprakarsai berdirinya pondok pesantren Burengan-Banjaran Kediri pada tahun 1950, Setelah berdirinya pondok Burengan, maka ajaran pondok ini berkembang. Pada waktu itu kondisi bangunan pondok masih sangat sederhana yaitu dengan dinding bambu dan lantai tanah. Dengan perjuangan dakwah yang tidak mengenal lelah dan penuh dengan pengorbanan akhirnya K.H. Nurhasan berhasil mengembangkan pondok pesantren ini dengan cepat. Secara historis pendirian pondok pesantren LDII diawali pada tahun 1950 saat K.H. Nurhasan Al-Ubaidah bertabligh ke wilayah Kabupaten Kediri. Dakwahnya dilakukan di sebuah Surau milik Mbah Damah yang pada saat itu dikenal sebagai orang kaya di desa Burengan Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri. Berkat kesabaran dan kegigihannya, lambat laun, dia membeli sebuah rumah di jalan Kenari No. 9 yang lokasinya berdekatan dengan surau Mbah Damah (sekarang dikenal sebagai Jalan Letjend. Suprpto gang I/21 Kediri) yang menjadi cikal bakal pondok pesantren di Desa Burengan, Kecamatan Pesantren, Kabupaten Kediri dan Desa Banjaran, Kecamatan Kota, Kabupaten Kediri yang akhirnya menjadi sebuah Pondok Pesantren besar bernama Pondok Pesantren Burengan-Banjaran Kediri. Hingga perkembangan pendidikannya setelah K.H. Nurhasan menyerahkan kepada Ketua Pondok Lemkari yang saat itu Drs. Bachroni Hertanto hingga pondok Ponpes Burengan menjadi pondok LEMKARI pada tahun 1972 karena pada saat itu K.H. Nurhasan yang sakit. Pada tahun 1981 LEMKARI resmi berkantor pusat di Jakarta, dan pondok pesantren Burengan-Banjaran bernama pondok pesantren LEMKARI. Pada saat Mubes IV, atas usulan bapak Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) H. Rudini LEMKARI berubah menjadi LDII dan Ponpes LEMKARI, bernama Ponpes LDII pada tahun 1990. Hingga tahun 2010, DPP LDII memandirikan dan mengefektifkan pengelolaan pondok pesantren kepada Yayasan Wali Barokah, Dan pondok pesantren LDII bernama pondok pesantren Wali Barokah.

SUMMARY

This thesis is entitled "The Role of K.H. Nurhasan Al-Ubaidah in the Development of the LDII Islamic Boarding School in Kediri in 1990-2010 ". Some of the factors examined are; First, what is the background of the establishment of the LDII Islamic boarding school in Burengaan Kediri and the role of K.H. Nurhasan in developing his teachings, and how is the education system in the Islamic Boarding School LDII Burengaan Kediri, how is the relationship between the Islamic Boarding School LDII Burengaan Kediri and the surrounding community? In studying this problem is a way of history using social culture.

K.H. Nurhasan and H. Ahmad Ibroham who initiated the establishment of the Burengaan-Banjaran Kediri Islamic boarding school in 1950, After the establishment of the Burengaan hut, the verse of this cottage developed. At that time the condition of the cottage building was still very simple, with bamboo walls and dirt floors. With the da'wah struggle that does not know tired and full of final sacrifice K.H. Nurhasan managed to develop this boarding school quickly. The history of the establishment of the LDII Islamic boarding school began in 1950 when K.H. Nurhasan Al-Ubaidah went to the district of Kediri. His da'wah was carried out in a Surau owned by Mbah Damah who at that time was known as a rich man in the village of Burengaan, Pesantren District, Kediri District. Thanks to his patience and perseverance, he gradually bought a house on Kenari No. 9 which is located adjacent to Mbah Damah (now known as Jalan Letjend. Suprpto gang I / 21 Kediri) which became the forerunner of Islamic boarding schools in Burengaan Village, Pesantren District, Kediri Regency and Banjaran Village, Kota District, Kediri Regency which later became Pondok A large Islamic boarding school called the Burengaan-Banjaran Kediri Islamic Boarding School. Until the development of education after K.H. Nurhasan was said to Chairperson of Pondok Lemkari who at that time was Drs. Bachroni Hertanto until the Ponpes Burengaan hut became a LEMKARI hut in 1972 because at that time K.H. Nurhasan is sick. In 1981 LEMKARI was officially headquartered in Jakarta, and the Burengaan-Banjaran Islamic boarding school named LEMKARI Islamic boarding school. At the time of the Fourth Mubes IV, the Minister of the Interior (MENDAGRI) H. Rudini LEMKARI changed to LDII and Ponpes LEMKARI, named LDII Islamic Boarding School in 1990. Until 2010, LDII DPP established and streamlined the management of Islamic boarding schools to Wali Barokah Foundation, and Islamic boarding schools LDII is called Wali Barokah Islamic boarding school.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Sebagai lembaga pendidikan Islam paling tua, pondok pesantren telah mengajarkan tentang pengetahuan agama Islam.¹ Pondok pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, jika ditinjau dari sejarah pertumbuhannya, komponen-komponen yang terdapat di dalamnya, pola kehidupan warganya, dan pola adopsi terhadap berbagai macam inovasi yang dilakukannya dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan baik pada ranah konsep maupun praktik.² Lembaga ini merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari berbagai dimensi. Dari pesantren sebagai objek studi telah lahir doktor-doktor dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari antropologi, sosiologi, pendidikan, politik, agama, dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa pesantren sebagai sistem pendidikan Islam di negeri ini yang kontribusinya tidak kecil bagi pembangunan manusia.³

Kenyataan objektif yang tidak dapat dibantah bahwa pendidikan agama Islam di pondok atau di pesantren yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan benteng kuat perlawanan terhadap masuknya paham Komunisme. Melalui pesantren sebagai pranata pendidikan, ulama pada umumnya terus menyelenggarakan misinya agar menjadi umat yang berada di jalan yang benar menurut Islam. Hal ini terus dipertahankan agar pesantren tidak tercabut dari akar

¹M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1985), hlm. 15.

²Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2013), hlm.33.

³Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2009), hlm. 25.

utamanya yang telah melembaga selama ratusan tahun. Bahwa kemudian muncul tuntutan modernisasi pesantren, hal itu membuat pesantren terbawa arus sekularisasi karena ternyata pendidikan sekuler yang sekarang ini menjadi *trend*, dengan balutan pendidikan modern, tidak mampu menciptakan generasi mandiri. Sebaliknya, pesantren yang dikenal dengan tradisionalitasnya justru dapat mencetak lulusan yang berkepribadian dan mempunyai kemandirian. Pondok pesantren yang tersebar di pelosok-pelosok kepulauan Nusantara, turut pula menyumbangkan darma bakti dalam usaha mulia “*character building*” bangsa Indonesia.⁴

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi yang berazaskan Pancasila dan bertujuan untuk memberikan peningkatan kehidupan beragama, bermasyarakat dan turut serta membangun manusia Indonesia seutuhnya, dalam susunan masyarakat Pancasila yang adil dan makmur jasmaniah dan rohaniyah. Fungsi LDII sebagai wadah dan sarana bagi para da’i di dalam mengkaji dan melaksanakan karya dakwahnya untuk menyampaikan dan menyebarkan agama islam sebagai rahmat untuk seluruh alam.⁵

Dari sekian pondok yang berada di Jatim, lewat skripsi ini ingin saya perkenalkan, Pondok Pesantren LDII Burengan Banjarnegara Kediri yang mendasarkan dakwah Islamiyah pada Al-Qur’an dan Al-Hadits yang langsung dipimpin oleh K.H. Nurhasan Al-Ubaidah dengan pengurus pondoknya : Drs. Nurhasjim. Jamaa’ah Al-Qur’an Hadits ini didirikan sejak tahun 1950 dan telah berkembang dengan pesat karena landasan ajaran yang diberikan langsung kepada Qur’an dan Hadits.

Pondok pesantren ini terletak di daerah Burengan Banjarnegara Jawa Timur. Pengikutnya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat termasuk anggota ABRI dari seluruh wilayah Indonesia bahkan dari Sumatera sampai Biak Irian

⁴Faisal Ismail, *Percikan Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984), hlm. 69.

⁵Siti Pajriah, *Gerakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 1990-1998*, (Jurnal Artefak Vol. 1 No.1 Januari 2013), hlm 25.

Barat. Ikatan kekeluargaan yang diciptakan di dalam suasana pondok tersebut telah menjadi pedoman untuk melaksanakan masyarakat gotong-royong.⁶

Organisasi keagamaan ini ternyata punya daya tarik bagi orang-orang awam yang ingin belajar agama Islam. Alasannya cukup sederhana, menurut Bapak Sunarto, pemimpin pondok Wali Barokah LDII Kediri.⁷ Pengajaran agama di LDII tidak terlalu rumit. Para murid diajar mengaji langsung pada materi agama Qur'an dan Hadits yang sudah diterjemahkan. Di sini ada enam kitab hadist yang diajarkan kepada para jemaah Buchari, Muslim, Nasyai, Tarmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Daud yang disebut Kitabusshitah. Pengajaran yang dilakukan pada mulanya dengan ngaji keliling (berpindah-pindah tempat) yang dipimpin oleh K.H. Nurhasan Al-Ubaidah.

Cara ini sengaja dilakukan oleh LDII karena yang dibutuhkan oleh jemaah ingin langsung mempraktekkan ajaran agamanya. Maka, organisasi ini punya dewan guru, yang khusus mengajarkan agama kepada jemaah yang hanya membutuhkan pengamalan semata. Pada tahun 1950 kegiatan pengajian ini hanya diikuti sekitar 50 orang yang sebagian besar jemaahnya laki-laki, sedangkan perempuan hanya kerabat/saudara K.H. Nurhasan.⁸ Kemudian kegiatan pengajian ini semakin berkembang dengan bertambah banyak yang diikuti oleh sekitar 100 orang.

LDII telah mengadakan perubahan terhadap ajaran-ajaran yang tidak disukai masyarakat muslim lainnya. Tanda-tanda perubahan itu belum terlihat secara jelas bagi orang luar. Kehadiran tokoh-tokoh LDII di Kediri dalam salat terawih bersama jemaah lain di pendopo Kotamadya Kediri, sudah dilihat banyak orang. Masih terdapat golongan yang tertutup yang berpegang pada Islam Jamaah

⁶Nurhasyim, *Menunda Bai'at Adalah Merugikan Diri Sendiri dan Keluarga* (Kediri: Pondok Burengan, 1973), hlm. 9.

⁷Wawancara dengan Sunarto, 25 Mei 2017.

⁸Wawancara dengan Sunarto, 25 Mei 2017.

sebagaimana yang diajarkan Amir Nurhasan Al-Ubaidah sejak 1941 sampai ia meninggal pada tahun 1982.⁹

Pesantren Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Burengan Kediri pada tahun 1992 dengan dihadiri sekitar 10.000 santri di kompleks pesantren, diresmikan gedung yang disebut gedung Wali Barokah, dengan biaya pembuatan sebesar Rp 1,5 milyar. Puncak sukses perhelatan tersebut adalah hadirnya Menteri Dalam Negeri H. Rudini bersama Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri Hari Soegiman serta Gubernur Jawa Timur Soelarso. Kehadiran Menteri Rudini disana tentu saja memberi legitimasi atas eksistensi LDII.¹⁰

Departemen Dalam Negeri beranggapan bahwa dengan hadirnya Menteri Dalam Negeri Rudini di sana, pemerintah menganggap pembinaan terhadap LDII berhasil. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada catatan dari Departemen Agama yang menyatakan bahwa LDII mengembangkan ajaran sesat,” selain itu, Menteri Dalam Negeri juga salut pada LDII, yang mampu membangun dari gedung milyaran rupiah tanpa minta sumbangan dari Pemerintah. Dari segi pembinaan politik, ini merupakan contoh bagaimana caranya ormas berswadaya secara gotong-royong.¹¹

Ada tiga pusat kegiatan yang dipakai H. Nurhasan Al-Ubaidah. Pondok Burengan Kediri di samping sebagai pusat organisasi formilnya, juga tempat pendidikan tingkat pertama dan menengah. Lalu pondoknya yang besar di Gading (Perak, Jombang) yang dikenal sebagai tempat para mubaligh pilihan dan pondok ketiga terletak di Kertosono, beberapa meter dari terminal kota. Itulah tiga tempat untuk mencetak kader.¹²

⁹Zed Abidien, Moch. Farried Cahyono, “*Yang Terbuka dan Tertutup*”, *Tempo*, 25 Januari 1992.

¹⁰Zed Abidien, Moch. Farried Cahyono, *Yang Terbuka dan Tertutup*, *Tempo*, 25 Januari 1992.

¹¹Priyono. B Sumbogo, Kalik. M Nugroho, Zed Abidien, *Mengapa Rudini Datang*, *Tempo*, 18 Januari 1992.

¹²“Haji Baidah Orang Kaya”, *Tempo*, 22 September 1979.

Para ulama di Indonesia, menafsirkan jamaah sebagai satu-kesatuan sosial bukan kerajaan agama yang harus diatur oleh suatu *imarah* (pengurusan atau pemerintahan). Untuk itu memang harus ada pernyataan setuju dan sudah itu harus ditaati dalam batas kewajaran. Itulah yang terjadi dalam hidup Nabi dan para sahabat, lengkap dengan kondisi ketika itu. Yang disebut Amirul Mukminin. Akan tetapi dengan daya tarik Nurhasan dan kualitas Nurhasyim dibinalah sebuah kekuasaan yang menjulurkan tangan-tangannya kebawah secara hirarkis lewat amir-amir. Pada tahun 1974 susunan keamiran disebut sebagai Amirul Mukminin di pusat, yakni pondok Burengan Kediri, kemudian amir daerah (setingkat gubernur), amir desa (Bupati), amir kelompok (Camat). Di bawah itu imam-imam lokal atau para mubaligh yang dibiayai dengan uang dari sumbangan dan *ru'yat* (rakyat).

Keberadaan madrasah di pesantren diharapkan mampu menunjukkan gambaran baru tentang bentuk lembaga pendidikan yang lebih modern. Oleh karena itu di satu segi pesantren menyampaikan Islam kaitannya dengan tuntutan kualitas SDM yang mengikuti perkembangan sains dan teknologi dan di segi lain mampu mencetak SDM yang berkualitas, bertanggung jawab dan rasional serta berakhlakul karimah.¹³ Berdasarkan pada uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan K.H. Nurhasan Al Ubaidah dalam mengembangkan ajarannya ?
2. Bagaimana perkembangan pendidikan pada tahun 1990-2010 Ponpes LDII Burengan Kediri ?
3. Bagaimana hubungan antara Ponpes LDII Burengan Kediri dengan masyarakat ?

¹³Syamsul Ma'arif, *Pesantren Vs Kapitalisme Sekolah* (Semarang: NEED'S PRESS, 2008), hlm. 129.

B. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah diperlukan agar penelitian dapat lebih berfokus dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan metodologis. Penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup, yakni temporal, spasial, dan keilmuan.

Dalam sebuah penelitian, ruang lingkup dan permasalahan ilmu sejarah tidak saja ditentukan oleh logika ilmu dan oleh sifatnya yang universal, tetapi juga oleh perjanjian yang mungkin tampaknya seakan-akan dipaksakan oleh para pemeliharanya. Hal ini ditentukan oleh kemungkinan pengerjaannya dan oleh lingkungan sosial kultural memberikan padanya patokan-patokan dalam mengatasi daerah penjelajahannya dan menentukan fokus perhatiannya.¹⁴

Setiap penulisan sejarah senantiasa dituntut untuk menentukan batas-batas topik yang akan dibahas agar memperoleh suatu kejelasan yang mendalam. Ruang lingkup spasial merupakan batasan wilayah, tempat dan kedudukan obyek penelitian. Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini terletak di Burengan Kediri Jawa Timur. Pemilihan Kediri sebagai lingkup spasial didasarkan dengan adanya pondok pesantren LDII Burengan yang merupakan salah satu daerah tempat persebaran LDII yang sangat pesat dikarenakan K.H. Nurhasan Al Ubaidah dilahirkan di Desa Bangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri Jawa Timur tahun 1908. K.H. Nurhasan sebagai orang yang berpendirian teguh. Di samping itu ia dikenal sebagai orang yang terbuka, sabar, dan tabah dalam menghadapi tantangan-tantangan. ia di kenal sebagai kyai di desa dan pesantrennya.

Ruang lingkup temporal berkisar antara tahun 1990-2010. Tahun 1990 dipilih sebagai batas awal kajian dengan alasan bahwa pada tahun 1990 diselenggarakannya Mubes IV, atas usulan Bapak Menteri Dalam Negeri H. Rudini, LEMKARI berubah menjadi LDII yang nantinya berubah menjadi Pondok pesantren LDII. Belajar dari pengalaman masa lalu yang penuh dengan gejolak dan tantangan, LDII tidak mengangkat lagi ajaran-ajaran yang menyebabkan keresahan di dalam masyarakat, khususnya masalah jama'ah,

¹⁴Taufiq Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1978), hlm. 10.

keamiran dan baiat dengan segala rentetannya. Kalau dahulu penguasa tunggal adalah amir yang mempunyai kekuasaan mutlak, setelah terbentuknya LDII, pemegang kekuasaan adalah Musyawarah Nasional, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar bab VIII Pasal 20 dan Bab IX Pasal 23. Begitu pula dalam prinsip-prinsip Dakwah LDII yang ditetapkan pada tanggal 13 September 1994, tidak disebutkan ajaran-ajaran tentang jama'ah, keamiran dan baiat. Batas akhir periode penelitian adalah tahun 2010 dimana DPP LDII memandirikan dan mengefektifkan pengelolaan Ponpes kepada Yayasan Wali Barokah, dan Ponpes LDII berganti nama menjadi Pondok Pesantren Wali Barokah.¹⁵

Ruang lingkup keilmuan, penelitian ini digolongkan ke dalam disiplin ilmu sejarah sosial politik. Kajian dalam sejarah sosial politik mencakup aspek dinamis atau perkembangan ormas yang dikaji dan menghubungkannya dengan konteks politik berdasarkan jiwa zaman yang hidup pada kurun tertentu.¹⁶ Demikian pula ilmu sejarah mempunyai beberapa lapangan khusus atau tematis dalam mendekati objek sejarah seperti sejarah sosial, sejarah militer, sejarah politik dan sebagainya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Perkembangan Ponpes LDII Burengan Kediri dan Peranan H. Nurhasan Al-Ubaidah sebagai pendiri Ponpes sekaligus sebagai pendiri LDII, yang semula bernama LEMKARI didirikan tanggal 3 Januari 1972, dan kemudian berganti nama menjadi LDII sesuai keputusan Musyawarah Besar IV LEMKARI di Jakarta. Oleh karena itu lingkup penelitian ini masuk dalam kategori sejarah sosial politik dan pendidikan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang melatarbelakangi berdirinya pondok pesantren LDII dan untuk mengetahui bagaimana bentuk awal perkembangan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren. *Kedua* untuk mendiskripsikan perkembangan pendidikan di pondok pesantren setelah

¹⁵Daud Soleh, *Profil Ponpes Wali Barokah*, 13 Juli 2017.

¹⁶Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 200-201.

terbentuknya Yayasan dan mengungkapkan bagaimana peranan K.H. Nurhasan Al Ubaidah sebagai pendiri ponpes sekaligus sebagai pendiri LDII terhadap masyarakat Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sangat berguna dalam penulisan karya ini karena memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, untuk memperoleh pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Kedua, menegaskan kerangka teori yang akan dijadikan landasan pemikiran, Ketiga, memperdalam konsep-konsep yang akan digunakan dalam pembahasan suatu masalah. Dalam penelitian ini digunakan beberapa buku pokok yang merupakan bagian dari sumber-sumber sekunder sebagai acuan penulisan. Sumber-sumber sekunder tersebut Antara lain:

Pustaka pertama adalah karya dari Marwan Saridjo, dkk., yang berjudul *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*.¹⁷ Buku ini membahas pertumbuhan dan perkembangan pesantren-pesantren di Indonesia termasuk faktor yang mendorong perkembangan pesantren, memuat beberapa pesantren di Jawa, serta sistem pendidikan di pondok pesantren pada umumnya. Buku ini juga memberikan uraian deskriptif mengenai masuknya Islam di Indonesia, sejarah Wali Sembilan dalam usahanya merintis pondok pesantren.¹⁸

Pustaka kedua adalah disertasi yang diterbitkan menjadi buku yakni karya dari Hilmi Muhammadiyah yang berjudul *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*.¹⁹ Buku ini mengkaji awal pergerakan LDII di Kediri dengan pendekatan antropologi. Buku ini mengupas simbol-simbol awal dari LDII, yakni pondok

¹⁷Marwan Saridjo, dkk. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1930), hlm. 59.

¹⁸Sartono Kartodirdjo, *Metode dan Dedaktif Sejarah dalam lembaran Sejarah* (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas sastra dan kebudayaan UGM, 1974), hlm. 15.

¹⁹Hilmi Muhammadiyah, *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*, (Depok: Elsas, 2013).

pesantren Burengan Kediri, Jawa Timur. Buku ini sebagai pendukung penelitian, bagaimana perkembangan pondok pesantren LDII yang diawali di Kediri.

Pustaka ketiga buku karya Habib Setiawan yang judul *Dialog Ulama dan Ormas Islam dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Apa dan Bagaimana LDII Paradigma Baru*.²⁰ Dalam bukunya Habib Setiawan menulis tentang LDII dalam Rakernasnya pada awal tahun 2007, menyampaikan delapan pernyataan atau klarifikasi terhadap berbagai isu keagamaan yang muncul selama ini. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan keagamaan yang ada di Indonesia, ada dua hal yang perlu disampaikan oleh LDII kepada masyarakat umum, yaitu: (1) dalam konteks organisasi, LDII menerapkan *leadership* (kepemimpinan) yang bertanggung jawab dan amanah sebagai *ra'in*. Nilai-nilai kepemimpinan tidak hanya ditumbuhkembangkan dalam organisasi LDII, tetapi juga dipraktikkan dari mulai keluarga, pondok pesantren, dan dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat; (2) dalam konteks agama, LDII bertujuan secara khusus membangun warganya dan umat Islam pada umumnya agar menjadi hamba Allah yang tekun beribadah dan menjadi warga negara yang baik.

Buku ini juga ditulis sebagai penjelasan ulang terhadap kesimpang-siuran informasi di berbagai kalangan umat Islam. Klarifikasi itu disampaikan bahwa: (1) LDII sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan yang telah memiliki paradigma baru sebagai hasil Munas VI tahun 2005 dan menerapkannya dalam segenap aktivitas organisasi. Pada Munas VI, LDII secara mutlak tidak berafiliasi lagi dengan partai politik manapun. Suasana kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama semakin dinamis dan bebas. Orang semakin leluasa berpendapat tentang apa saja, termasuk tentang hal-hal negatif atas suatu golongan tertentu, tidak terkecuali LDII; (2) LDII bukan penerus atau kelanjutan dari gerakan Islam Jama'ah serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan Islam Jama'ah. Pada awal keberadaannya LDII bersama-sama dengan ormas lain, seperti Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) untuk membina orang-orang yang masih

²⁰Habib Setiawan, *Dialog Ulama dan Ormas Islam Dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) "Apa dan Bagaimana LDII Paradigma Baru"* (Jakarta: MUI, 2007).

mengajarkan paham Islam Jama'ah kearah yang dimiliki umat Islam umumnya; (3) LDII tidak menggunakan sistem keamiran, yang menjadi garis organisasi. LDII sejak awal berdirinya adalah kepemimpinan yang menumbuhkembangkan tanggung jawab dan amanah sebagai *ra'in*. Sebagaimana sabda Rasullulah SAW yang artinya: “bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya dari apa yang dipimpinnya; (4) *man kaffaro mu'minan fahuwa kaafirun*. LDII tidak pernah menganggap umat Islam muslim diluar LDII sebagai kafir atau najis. Risikonya terlalu besar, tidak ada manfaatnya mengkafirkan orang muslim yang lain; (5) Masjid LDII (masjid yang dikelola LDII) terbuka umum, yang ada adalah masjid masyarakat; (6) LDII dalam pengayaan ilmu tidak hanya dari pondok yang berkapasitas ustadz atau ulama, tetapi juga guru-guru dan pengurus organisasi yang memiliki ilmu dalam bidang dakwah; (7) LDII tidak pernah menolak untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya untuk orang lain dan tidak pernah menolak untuk diimami oleh orang luar warga LDII; (8) LDII bersama-sama dengan organisasi masyarakat lainnya mengikuti landasan berfikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan oleh MUI “Taswiyah al Manhaj”.

Pustaka ini bermanfaat dalam menceritakan apa dan bagaimana LDII paradigma baru, sejarah singkat LDII, serta kegiatan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) LDII DKI Jakarta tahun 2007.

Pustaka keempat di tulis oleh Zamakhsyari Dhofier yang berjudul *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*.²¹ Buku ini adalah hasil penelitian lapangan atas dua buah pesantren Tebu Ireng di Jombang dan pesantren Tegalsari di Salatiga. Buku ini membahas tradisi pesantren dengan fokus utama pada peranan Kiai dalam memelihara dan mengembangkan faham Islam tradisional di Jawa. Menurut Dhofier semangat Islam datang dari tujuh bab. Buku ini termasuk jenis penulisan sejarah lokal, berusaha menyoroti sejarah kedua

²¹Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1985).

pesantren terutama mengenai peranannya dalam pelestarian dan pengembangan Islam tradisional di Jawa.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis suatu peristiwa historis diperlukan suatu alat yaitu dengan cara meminjam teori-teori dari ilmu sosial. Di Indonesia cara ini dipelopori oleh Sartono Kartodirdjo, yang bertolak dari teorinya bahwa sejarah sebagai rangkaian peristiwa masa lampau hanyalah mungkin dapat dimengerti dan diterangkan dalam konteks struktural yang merupakan wadah dari suatu peristiwa.²²

Rekonstruksi sejarah perlu didasarkan pada kerangka pemikiran tertentu yang mencakup konsep-konsep dan teori-teori yang dipakai untuk memahami peristiwa yang dikaji.²³ Dengan demikian rekonstruksi atas suatu peristiwa akan bergantung pada pendekatan yang digunakan, mencakup sudut pandang yang digunakan, dimensi-dimensi yang harus diperhatikan, dan unsur-unsur yang harus diungkapkan.²⁴ Kerangka pemikiran adalah kerangka pemikiran yang bersifat teoritis mengenai masalah yang ditulis. Kerangka berpikir tersebut menggabungkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti.²⁵

Skripsi ini berjudul “Peranan K.H. Nurhasan Al-Ubaidah dalam Pengembangan Pondok Pesantren LDII Burengan Kediri Tahun 1990-2010”, oleh karena itu terlebih dahulu penulis akan menerangkan mengenai pendiri Ponpes tersebut, peranan kiai dan pendidikan yang ada di pesantren (Madrrasah) hingga

²²Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 71.

²³Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 2.

²⁴Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 4.

²⁵Adi Rianto, *Langkah-langkah Penelitian Sosial* (Jakarta: Penerbit Ikran, 1991), hlm. 17.

hubungan Ponpes dengan masyarakat sekitar. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.²⁶

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain²⁷: (1) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat; (2) peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; (3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Unsur-unsur baku dalam sistem lapisan sosial masyarakat adalah sebagai berikut : (1) kedudukan (*status*) merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu, dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Ada dua macam kedudukan yang dikembangkan dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut: (a) *ascribed* status: kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran; (b) *achieved* status: kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang di sengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya; (c) kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu *assigne*-status tersebut

²⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 213.

²⁷Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 213.

sering mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved* status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberi kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat; (2) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut: (a) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; (b) peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan dalam masyarakat sebagai organisasi; (c) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.²⁸

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lain yang sejenis.²⁹ Dalam pemakaian sehari-hari, istilah pesantren bisa disebut dengan pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Secara esensial, semua istilah ini mengandung makna yang sama, kecuali sedikit perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren.³⁰

Pesantren semata-mata mengajarkan ilmu-ilmu agama lewat kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab, Melayu atau Jawa atau bahasa-bahasa lokal lain di Indonesia dengan menggunakan aksara Arab, yang selain ditulis oleh ulama di Timur Tengah, juga ditulis ulama Indonesia sendiri.³¹ Dalam kegiatan belajar mengajar kitab kuning, sistem pendidikan baik

²⁸Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 217.

²⁹Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 55.

³⁰Mujamil Qomar, *Pesantren Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 1.

³¹Husen Hasan Bisri, *Pengajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren* (Jakarta: Puslitbang Penda, 2012), hlm. 27-28.

metode, sarana fasilitas serta yang lainnya masih bersifat tradisional. Kemudian dalam perkembangan berikutnya pesantren mengalami dinamika, kemampuan dan kesediaan pesantren untuk mengadopsi nilai-nilai baru akibat modernisasi, menjadikan pesantren berkembang dari yang tradisional ke modern.³²

Pesantren tumbuh dari bawah, atas kehendak masyarakat yang terdiri atas: kiai, santri dan masyarakat sekitar. Di antara mereka, kiai memiliki peran paling dominan dalam mewujudkan sekaligus mengembangkannya. Kiai adalah pemimpin nonformal sekaligus pemimpin spiritual, dan posisinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa.³³ Menurut Zamakhsyari Dhofir perkataan Kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda. *Pertama*, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap sakti dan keramat, misalnya Kyai Garuda Kencana dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Kraton Yogyakarta. *Kedua*, sebagai gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya. *Ketiga*, sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren.³⁴

Kiai merupakan elemen terpenting dalam pesantren. Kiai menguasai dan mengendalikan seluruh sektor kehidupan pesantren. Pada mulanya sebutan Kiai berasal dari seorang yang alim berdomisili di suatu tempat. Ia berasal dari komunitas penduduk asli daerah tempat tinggalnya, dimana ia diketahui baru pulang kampung setelah sekian lama menuntut ilmu. Seiring berjalannya waktu masyarakat mulai mengetahui bahwa sang alim tersebut memiliki banyak sekali kelebihan dalam berbagai bidang yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Sang alim inilah kemudian dikenal dengan sebutan “kiai”. Masyarakat mulai

³²Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 22.

³³Qomar, *Pesantren Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, hlm. 29.

³⁴Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global* (Jakarta: IRD PRESS, 2004), hlm. 28.

berdatangan untuk meminta bimbingan tentang berbagai persoalan, terutama persoalan tentang agama. Kemudian sang kiai memberikan bimbingan, pendidikan, serta pengajaran agama Islam yang mereka butuhkan. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan “santri”.³⁵

Secara harfiah santri adalah siswa yang belajar di pesantren. Pada perkembangannya, santri digolongkan menjadi dua kelompok yaitu; pertama santri *mukim*, yaitu santri yang berdatangan dari tempat ketempat yang jauh yang tidak memungkinkan dia untuk pulang kerumahnya, maka ia mondok (tinggal) di pesantren. Sebagai santri mukim mereka memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Kedua santri *Kalong*, yaitu siswa-siswi yang berasal dari daerah sekitar yang memungkinkan mereka pulang ke tempat kediaman masing-masing. Santri kalong ini mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya dan pesantren³⁶.

Pesantren *Khalafi*. Tipe pesantren ini lebih tanggap terhadap perkembangan dan pembaharuan. Di samping mempertahankan tradisi lama, ia juga mengakomodasi terhadap tradisi-tradisi baru yang dianggap lebih baik. Model pesantren ini diakui sebagai yang akomodatif terhadap pembaharuan, di antaranya mulai akrab dengan kurikulum dan metodologi ilmiah moderen, semakin berorientasi terhadap pendidikan dan fungsional, pengaturan program kegiatan, serta mulai berfungsi sebagai pusat perkembangan masyarakat. Selain itu tipe pesantren ini telah membuka sistem sekolah umum di lingkungan dan di bawah tanggung jawab pesantren.³⁷

Inovasi pesantren dengan membentuk sistem sekolah umum atau lembaga madrasah tersebut dipengaruhi oleh respon pendidikan Islam terhadap pendidikan

³⁵Muhammad Dawam Saleh, *Jalan Ke Pesantren* (Jakarta: PT Dunia Pustaka, 2004), hlm. 13.

³⁶Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 64.

³⁷Koirun Niam, *Madrasah Qudsiyyah dan Pembangunan Nasionalisme Kaum Santri di Kudus, 1919-2006* (Skripsi Pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang, 2015), hlm. 12.

kolonial Belanda sebagai akibat politik etis dan adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. pada abad ke 20 kemunculan madrasah sebagai wujud pembaharuan pesantren.³⁸ Perkataan madrasah berasal dari bahasa arab yang artinya tempat belajar.³⁹ Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950, madrasah mengandung makna: *Pertama*, tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. *Kedua*, pondok dan pesantren yang memberi pendidikan setingkat dengan madrasah.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, yaitu pesantren dengan menfokuskan kajian pada nilai-nilai fundamental pendidikan pesantren yang membentuk pola tersendiri dengan memilih objek penelitian di Ponpes Wali Barokah Burengan Kediri.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah kritis yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau.⁴¹ Metode sejarah kritis ini terbagi menjadi empat tahap yaitu:

Tahap pertama, heuristik atau pengumpulan data. Heuristik yaitu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari kesaksian langsung dan dokumen yang berhubungan

³⁸Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratis Institusi*, hlm. 91.

³⁹Daulay, *Sejarah Pertumbuhan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 94.

⁴⁰Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 101-102.

⁴¹Louis Gotchalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 32.

erat dengan objek penelitian. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak berasal dari saksi peristiwa yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

Sumber primer yang didapatkan oleh penulis yaitu berupa dokumen-dokumen dari Ponpes Wali Barokah sejak awal pendirian pesantren, struktur organisasi, jumlah santri, dan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan yang dikaji. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu kiai dan santri Pondok Pesantren Wali barokah, serta masyarakat Desa Burengan untuk mendapatkan informasi mengenai Ponpes yang tidak terdapat dalam sumber tertulis. Proses pencarian sumber sekunder diawali dengan studi pustaka yaitu mencari, menelusuri dan menelaah buku yang relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk menemukan buku-buku tersebut peneliti mencari berbagai tempat seperti Perpustakaan Jurusan Sejarah Undip, Perpustakaan Undip, Perpustakaan IAIN Walisongo, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Depag Semarang, dan juga artikel-artikel dari internet.

Tahap ke dua adalah kritik sumber. Kritik sumber digunakan untuk pengumpulan informasi yang dapat diperoleh dari sumber sejarah, baik kritik intern maupun kritik ekstern. Kritik intern yaitu penilaian yang dimaksudkan untuk mengetahui kredibilitas sumber yakni pernyataan yang dapat dipercaya, sedangkan kritik ekstern yaitu digunakan untuk mengetahui keaslian dari sumber sejarah.⁴² Kritik ekstern yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat asal sumber, penulis sumber dan pelaku sejarah. Untuk pemilihan pengkisah sejarah peneliti mendatangi pengkisah yang dapat dipercaya member keterangan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Hasil wawancara dikritik dengan cara membandingkan hasil wawancara antara pengkisah sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan.

Tahap ke tiga yaitu interpretasi. Interpretasi adalah tahapan yang dilakukan oleh sejarawan atau peneliti dalam menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh dengan membandingkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Dalam

⁴²Louis Gotchalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto hlm. 80.

interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. *Pertama*, analisis berarti menguraikan, karena terkadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan. *Kedua*, sintesis yang artinya menyatukan fakta-fakta yang diperoleh setelah peneliti melakukan kritik sumber, dengan membandingkan dua fakta atau lebih.⁴³ Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan analisa atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta tersebut kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Sintesis sendiri dilakukan oleh seorang peneliti yang memiliki konsep, yang diperoleh dari sebuah bacaan, sehingga menimbulkan hasil yang beragam. Di dalam interpretasi sejarah, seorang peneliti dituntut untuk dapat mengetahui sebab ataupun faktor yang menyebabkan suatu peristiwa itu terjadi, yang biasanya diperoleh dari sebuah data sejarah.

Tahap ke empat adalah historiografi. Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian yaitu berupa penulisan sejarah. Karya ilmiah ini harus mampu menciptakan kembali totalitas peristiwa atau merekonstruksikan kembali masa lampau yang sesungguhnya secara lengkap.

Adapun subjek penelitian ini adalah lembaga pendidikan Ponpes Wali Barokah. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, berdasarkan pendekatan historis dan sosiologis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil dari penelitian ini secara menyeluruh, penulis membagi penulisan ini dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang yang terdiri dari permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II memuat penjelasan mengenai berdirinya Pondok Pesantren LDII Burengan Kediri, mulai dari peranan K.H. Nurhasan Al-Ubaidah sebagai pendiri

⁴³Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 101-103.

pondok. Selain itu, menjelaskan peralihan pondok Burengan dari K.H. Nurhasan ke Drs. Bachroni menjadi LEMKARI. Selanjutnya menguraikan tentang Pondok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan Pondok Wali Barokah.

Bab III menguraikan tentang pondok pesantren LDII Burengan Kediri pada tahun 1990-2010 mulai dari sistem pendidikan pondok pesantren LDII Burengan Kediri tahun 1990-2010 menjelaskan kurikulum Ponpes LDII Burengan Kediri hingga metode pembelajaran, jaringan pembelajaran, tingkatan kelas dan kegiatan para santri pondok pesantren LDII Burengan Kediri.

Bab IV menggambarkan hubungan sosial pondok pesantren LDII Burengan Kediri dengan masyarakat yang meliputi rekrutmen santri, penugasan, praktik budi luhur, kerja sama pondok pesantren LDII Burengan Kediri dengan masyarakat, hubungan pondok pesantren LDII Burengan Kediri dengan Ormas LDII yang melingkupi peranan LDII di bidang pendidikan dan reaktualisasi Pancasila di dalam lapisan masyarakat.

Bab V berupa simpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dikaji dalam penulisan skripsi ini.